

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : Optimalisasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter di Kabupaten Kulon Progo

Nama : Mukhlisin

NIM : 14401244008

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum



Yogyakarta, 17 Desember 2018

Riviewer

Dr. Eny Kusdarini, M.Hum
NIP. 19600304 198601 2 001

Dosen Pembimbing

Dr. Suharno, M.Si
NIP. 19680417 200003 1 001

Rekomendasi Pembimbing: (mohon lingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Jurnal Civics
3. Dikirim ke Jurnal Lain

OPTIMALISASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN KARAKTER DI KABUPATEN KULON PROGO

THE OPTIMALIZATION OF IMPLEMENTATION MANAGING CHARACTER EDUCATION POLICY IN KULON PROGO REGENCY

Mukhlisin dan Suharno

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum

mukhlisin248fis@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan pendidikan karakter. 2) Mendiskripsikan optimalisasi implementasi kebijakan pengelolaan pendidikan karakter. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan metode dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check*. Teknik analisis data dilakukan dengan tahap-tahap reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan pendidikan karakter yaitu pembuatan modul yang lama, kurangnya guru agama, sarana dan prasarana yang belum memadai, minimnya anggaran, belum terjalannya koordinasi yang baik, kurangnya pengetahuan dari *stakeholders*, mutasi jabatan kepala sekolah, minimnya partisipasi masyarakat, perlunya adaptasi dari sekolah. 2) Optimalisasi implementasi kebijakan pengelolaan pendidikan karakter, meliputi a) Upaya pemerintah daerah yaitu menetapkan peraturan pelaksanaan kebijakan, menambah guru agama, pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan anggaran, meningkatkan koordinasi, sosialisasi, promosi jabatan kepala sekolah, mensinergikan kebijakan dengan peran masyarakat dan menginternalisasikan kebijakan pada kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. b) Upaya satuan pendidikan yaitu melaksanakan penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler.

Kata Kunci: *Optimalisasi, Kebijakan, Peraturan Daerah, Pendidikan Karakter*

Abstrak

This research aimed to: 1) Knowing the causes of the implementation of character education managing policy hasn't been optimal. 2) Describe that the implementation optimalization of character education managing policy. This research is a descriptive study with a qualitative approach. Determination of the research subject by purposive technique. Data collection techniques were carried out by interview method and documentation method. Data validity checking technique uses cross check technique. Data analysis techniques are carried with the steps of data reduction, data display and conclusions. The results showed that: 1) The causes of the implementation of character education managing policy hasn't been optimal that are, making the modules, lack of religious teachers, inadequate facilities and infrastructure, lack of budget, the lack of coordination, lack of stakeholders knowledge, mutation of the position of principal, lack of community participation, the need for adaptation from school. 2) Optimilization of implementation character education managing policy, covers a) Regional government efforts, that are, establish regulations for impementing policy, add religious teachers, provision of adequate facilities and infrastructure, increase budget, improve coordination, socialization, promotion of the principal, synergizing policy with the role of the community, internalize, policy in pleasant learning. b) educational unit effeorts, that are, carry out strengthening of character education through intracurrucular activities, co-curricular activities and extracurricular activities.

Keywords: *Optimalization, Policy, Local Regulation, Character Education*

PENDAHULUAN

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

dapat dipahami bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan watak manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta membantu mengembangkan pembangunan karakter bangsa. Pendidikan bukan hanya

mencetak seseorang yang memiliki wawasan luas serta tinggi, akan tetapi juga memiliki sikap dan karakter yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila sebuah bangsa memiliki warga negara yang cerdas serta memiliki karakter yang baik, maka akan menjadi dasar atau fondasi yang kokoh dalam membentengi segenap elemen bangsa dari intervensi budaya-budaya luar yang dikhawatirkan dapat menggerus budaya-budaya luhur bangsa. Selain itu pendidikan juga menjadi modal yang penting untuk menghadapi tuntutan serta tantangan zaman yang semakin kompleks saat ini.

Dewasa ini salah satu tantangan zaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah krisis moral atau lunturnya karakter luhur bangsa yang melanda generasi muda. Krisis karakter bangsa tersebut antara lain disebabkan oleh budaya asing serta perkembangan teknologi yang tidak digunakan secara bijak sehingga terjadi banyak penyimpangan seperti pergaulan bebas, penggunaan narkoba, pornografi, tawuran antar pelajar, hilangnya rasa hormat terhadap guru dan orang tua, lunturnya sikap kejujuran dan masih banyak lagi yang menjadi masalah yang berlarut-larut hingga saat ini belum dapat teratasi dengan maksimal. Atas dasar permasalahan tersebut, banyak orang yang berpandangan bahwa yang ditemui sekarang ini diduga berawal dari apa yang dihasilkan oleh dunia pendidikan (Zubaedi, 2011: 1). Proses pendidikan di Indonesia hingga saat ini dapat dikatakan masih belum berjalan dengan baik serta efektif mengingat masih banyaknya kasus-kasus yang melibatkan anak-anak atau remaja usia sekolah yang mencoreng citra baik pendidikan nasional.

Berbagai kasus krisis moral yang melanda generasi penerus bangsa semakin membuktikan bahwa proses pendidikan di Indonesia belum mampu secara maksimal menciptakan generasi yang berkarakter Pancasila. Garin Nugroho dalam orasi budaya bertema “Pendidikan Karakter Kunci Kemajuan Bangsa” menyatakan bahwa sampai saat ini dunia pendidikan di Indonesia dinilai belum mendorong pembangunan karakter bangsa. Hal ini disebabkan oleh ukuran-ukuran dalam pendidikan tidak dikembalikan pada karakter peserta didik, akan tetapi dikembalikan pada pasar. Selama ini pendidikan telah kehilangan nilai-nilai luhur kemanusiaan, padahal pendidikan seharusnya memberikan pencerahan nilai-nilai luhur itu sendiri. Selain itu, pendidikan nasional kini telah kehilangan rohnya lantaran tunduk terhadap pasar bukan pencerahan terhadap peserta didik, pasar tanpa karakter akan hancur dan menghilangkan aspek-aspek manusia dan

kemanusiaan, karena kehilangan karakter itu sendiri (Muslich, 2014).

Zubaedi (2011: 3) menambahkan bahwa dalam konteks pendidikan formal di sekolah, bisa jadi salah satu penyebab masalah tersebut disebabkan karena pendidikan di Indonesia lebih menitikberatkan pada aspek intelektual atau kognitif, sedangkan aspek lain atau aspek *soft skills* yang merupakan unsur utama pendidikan karakter belum diperhatikan dengan optimal. Hal tersebut mengakibatkan peserta didik hanya menguasai pengetahuan adengan baik akan tetapi aspek pengembangan nilai karakter justru tidak muncul. Menyikapi permasalahan tersebut tentu perlu menjadi perhatian bagi semua kalangan baik pemerintah maupun masyarakat agar permasalahan krisis karakter dapat diatasi.

Mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia, maka proses penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan harus selalu diperbaiki dan terus melakukan inovasi serta yang paling penting proses pendidikan harus mengarah kepada tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran dan tanggung jawab yang besar untuk menanamkan karakter kepada peserta didik, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Sekolah merupakan lembaga yang paling penting setelah keluarga dalam menanamkan dan mengembangkan karakter melalui proses pendidikan karakter. Menurut Zubaedi (2011: 1) penguatan pendidikan karakter saat ini sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang terjadi di Indonesia. Karakter sangat penting bagi pembangunan sebuah bangsa, karena dengan memiliki karakter yang baik dan kuat, maka kita dapat menghadapi berbagai permasalahan yang ada di negara ini dengan tabah dan kuat.

Selain itu upaya perbaikan pendidikan nasional menjadi kebutuhan yang penting, karena menurut Thomas Lickona bahwa ada sepuluh tanda-tanda zaman yang harus diwaspadai karena jika tanda-tanda ini sudah ada, berarti sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran. Tanda-tanda yang di maksud antara lain. *Pertama*, meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. *Kedua*, penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk. *Ketiga*, pengaruh *peer-group* yang kuat dalam tindak kekerasan. *Keempat*, meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas. *Kelima*, semakin kaburnya pedoman moral

baik dan buruk. *Keenam*, menurunnya etos kerja. *Ketujuh*, semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. *Kedelapan*, rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara. *Kesembilan*, membudayanya ketidakjujuran, dan *kese sepuluh*, adanya rasa saling curiga dan kebencian diantara sesama (Lickona, 2016).

Prediksi yang dikemukakan oleh Thomas Lickona di atas tentu harus menjadi perhatian bersama oleh semua pihak mengingat saat ini telah terjadi berbagai kasus yang menunjukkan tanda-tanda kehancuran bangsa. Oleh karena itu, upaya perbaikan harus segera dilakukan agar bangsa Indonesia tidak terjerumus dalam jurang kehancuran. Perbaikan pendidikan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama semua elemen bangsa. Proses pendidikan harus didukung oleh semua pihak agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih baik dan efektif.

Pemerintah dan segenap elemen bangsa harus saling bahu-membahu untuk menata kembali proses pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembangunan karakter bangsa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik dan efektif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Strategi yang dapat diambil oleh pemerintah untuk membangun kembali karakter bangsa salah satunya adalah dengan menginternalisasikan pendidikan karakter pada instansi pendidikan semenjak tingkat usia dini. Strategi tersebut harus di dukung serta dilaksanakan oleh semua daerah di Indonesia agar misi pembangunan karakter bangsa dapat tercapai. Pembangunan pendidikan karakter yang diselenggarakan oleh daerah dilaksanakan melalui prinsip otonomi daerah. Pembangunan pendidikan di daerah pada hakikatnya adalah upaya terencana, terarah dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas daerah sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pembangunan pendidikan di daerah harus dikelola dan diselenggarakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di daerah.

Salah satu daerah yang mengelola pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan prinsip otonomi daerah dilaksanakan oleh Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo menetapkan kebijakan pada bidang pendidikan mengingat maraknya fenomena gradasi moral ataupun krisis karakter yang terjadi dikalangan generasi muda yang semakin memprihatinkan.

Fenomena-fenomena yang terjadi tersebut kemudian menimbulkan kekhawatiran dikalangan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Permasalahan tersebut kemudian dibawa dan masuk dalam agenda pemerintah yang kemudian menghasilkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter.

Harapan dengan ditetapkan kebijakan ini yaitu untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dari kehenacuran serta untuk membangun kembali karakter bangsa yang baik dan kuat dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selain itu, pemerintah daerah berharap dengan adanya kebijakan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter yaitu tidak sekedar menjadikan peserta didik cerdas akan tetapi betul-betul cerdas, berbudi pekerti luhur, religiusitas tercapai dan menguasai wawasan kebangsaan dengan baik.

Berdasarkan hasil pra penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter di Kabupaten Kulon Progo belum optimal sesuai dengan harapan. Pemerintah daerah Kulon Progo mengalami banyak keterbatasan dan hambatan dalam melaksanakan kebijakan tersebut sehingga implementasi kebijakan PPK baru dapat dilaksanakan pada awal tahun 2018. Melihat situasi serta kondisi pelaksanaan pendidikan karakter yang belum berjalan dengan baik, oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo berkomitmen untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter agar tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai dengan baik dan maksimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui secara keseluruhan penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, peneliti tertarik untuk mengetahui secara keseluruhan optimalisasi implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.

METODE PENELITIAN

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mengungkapkan suatu permasalahan atau fakta dan disertai interpretasi yang menggambarkan berbagai kondisi/situasi, dan gejala serta menjawab berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan subjek penelitian (Wirartha, 2006: 154). Penelitian Kualitatif dilakukan melalui proses induktif, yaitu berpangkal dari konsep khusus ke umum, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi yang dikembangkan berdasarkan masalah yang terjadi di lokasi penelitian (Djuandi & Almanshur, 2014: 73). Jadi peneliti ini ditujukan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan berbagai informasi yang terjadi di lapangan terkait implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter di Kabupaten Kulon Progo.

Pada penelitian ini, penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik *purposive*. Menurut Sugiyono (2012: 52), teknik *purposive* merupakan penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Peneliti terlebih dahulu menentukan kriteria subjek penelitian. Dasar pertimbangan yang digunakan peneliti untuk menentukan kriteria subjek penelitian adalah subjek terlibat langsung dan mengetahui tentang permasalahan yang diteliti, sehingga dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan. Seperti pejabat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan serta pemangku kepentingan yang memiliki wewenang terhadap pelaksanaan kebijakan ini.

Adapun subjek penelitian ini adalah Hamam Cahyadi, S.T (Anggota Komisi IV DPRD Fraksi Partai Keadilan Sosial Kabupaten Kulon Progo), Eko Teguh Santosa, S.Pd (Sekretaris Disdikpora), Dian Putera Karana, S.Pd (Kepala Sub Bagian Perencanaan Disdikpora), Tutik Sriyani, M. Pd (Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Disdikpora), Drs. Suharyono (Kepala Bidang Pembinaan SD Disdikpora), Jujur Santosa, S.Pd., M. Hum (Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikpora).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Akan tetapi,

peneliti tetap dapat menanyakan informasi yang sekiranya penting untuk digali. Sedangkan dokumen yang peneliti ambil yaitu antara lain dokumen peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang PPK, peraturan bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman PPK pada satuan pendidikan, program kerja Disdikpora tahun 2017 sd 2022, berita media online maupun cetak dan dokumentasi pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di sekolah, ataupun dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang digunakan sebagai data pendukung hasil wawancara dan sebagai dokumen tertulis.

Metode pemeriksaan keabsahan data yang peneliti gunakan adalah metode *cross check*. Menurut Sugiyono (2016: 11) teknik *cross check* merupakan teknik pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. *Cross check* dilakukan dengan cara mengecek hasil dari wawancara dengan dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data ganda yaitu wawancara dan dokumentasi, maka data yang diperoleh melalui wawancara dapat diteliti dengan data hasil dokumentasi terkait segala sesuatu mengenai optimalisasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter di Kabupaten Kulon Progo.

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis data induktif. Menurut Sugiyono (2012: 89) analisa data bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan atau menjadi hipotesis. Dalam penelitian ini analisa data digunakan untuk menilai menganalisis data yang telah difokuskan dalam penelitian yaitu optimalisasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter di Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya setelah mendapatkan data dari peristiwa dan fakta yang terjadi maka akan dapat ditarik sebuah kesimpulan yang umum yaitu dengan cara menganalisis dan menyajikan dalam bentuk data deskriptif. Langkah-langkah dalam melakukan analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono (2016: 246-253) yaitu Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/ Verification*)

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter di Kabupaten Kulon Progo

Fokus utama studi kebijakan publik adalah penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Kebijakan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2015.

Menurut (Subarsono, 2013: 89) bahwa suatu kebijakan yang sudah ditetapkan maka tahap selanjutnya adalah akan dilaksanakan atau diimplementasikan. Sebuah kebijakan yang akan dan sudah diimplementasikan dapat menjadi sebuah kebijakan yang berhasil maupun kebijakan yang gagal. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Berikut merupakan variabel atau faktor penghambat yang peneliti temukan di lapangan berkaitan dengan proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter di Kabupaten Kulon Progo yaitu adanya faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal.

1. Faktor penghambat internal

a. Pembuatan Modul penguatan pendidikan karakter yang membutuhkan proses yang lama.

Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter di Kabupaten Kulon Progo baru dapat dilaksanakan pada awal tahun 2018. tertundanya implementasi kebijakan ini disebabkan belum adanya modul penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan. Pembuatan modul ini membutuhkan proses yang lama mengingat banyak aspek yang harus dibuat secara mendetail. Pembuatan modul ini meliputi aspek kurikulum, silabus, serta petunjuk teknis penguatan pendidikan karakter pada masing-masing jenjang pendidikan yaitu TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs.

Salah satu kesulitan utama pemerintah daerah dalam membuat modul penguatan pendidikan karakter ini terletak pada aspek pengembangan nilai karakter budaya kemandirian. Hal ini terjadi dikarenakan model pendidikan karakter berbasis kegiatan budaya kemandirian belum ada di daerah lain sehingga tim penyusun perangkat kebijakan mengalami beberapa kendala karena tidak memiliki banyak referensi.

b. Sumberdaya tenaga pendidik guru bidang agama yang terbatas

Aspek sumberdaya manusia memiliki pengaruh terhadap keberhasilan dari sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter di Kulon Progo terkendala dengan minimnya sumberdaya tenaga pendidik pada bidang agama. Jumlah guru bidang agama di Kabupaten Kulon Progo setiap tahun semakin berkurang. Keterbatasan ini kemudian berdampak pada persebaran guru agama di sekolah menjadi tidak merata. Tenaga pendidik bidang agama pada kebijakan ini memiliki pengaruh yang besar terhadap tercapainya tujuan pengembangan nilai karakter religiusitas. Karakter religius merupakan salah satu misi pengembangan nilai karakter di Kulon Progo selain pengembangan nilai semangat kebangsaan.

c. Sarana dan prasarana penguatan pendidikan karakter yang belum memadai dan lengkap

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 menunjukan bahwa sarana pendidikan jenjang TK/ RA memiliki kondisi ruang kelas kondisi kuang baik sebesar 45,71 %, prasarana alat permainan edukatif luar kurang baik sebesar 43,96% dan prasarana alat permainan edukatif dalam kurang baik sebesar 58,06 %. pada jenjang pendidikan SD menunjukan bahwa sarana ruang kelas kurang baik sebesar 73,71%, prasarana perpustakaan kurang baik sebesar 66,99%. selanjutnya pada jenjang pendidikan SMP menunjukan bahwa sarana ruang kelas kurang baik sebesar 48,98%. prasarana ruang perupustakaan dengan kondisi rusak sebesar 36,36%. Laboratorium Komputer dengan kondisi rusak sebesar 33,33%. Sarana SMP berupa Alat Seni Budaya memiliki 11 paket dengan kondisi kurang baik sebesar 27,27%.

Selain itu, kondisi sarana dan prasarana penguatan pendidikan karakter di Kulon Progo tidak merata serta masih ada kesenjangan yang cukup jauh terutama pada wilayah yang memiliki akses yang sulit yaitu di Kecamatan Girimulyo, Samigaluh dan Kalibawang. Kondisi seperti ini tentu harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Kulon Progo apabila ingin meningkatkan mutu pendidikan di seluruh wilayah di Kulon Progo.

d. Minimnya dukungan pembiayaan penguatan pendidikan karakter

Sumberdaya finansial memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Pada awal

pelaksanaan kebijakan ini pemerintah daerah hanya memaksimalkan anggaran pendidikan sebesar 20%. Anggaran yang ada tentu harus dimaksimalkan mengingat banyak kegiatan yang harus dilaksanakan selain kegiatan PPK.

Kondisi ini tentu kurang baik terhadap keberlangsungan kebijakan penguatan pendidikan karakter di Kulon Progo. Maka, perlu adanya evaluasi dan kajian kembali untuk memberikan alokasi khusus terhadap pelaksanaan kebijakan penguatan pendidikan karakter.

e. Belum terjalannya koordinasi yang baik antarorganisasi terkait

Jalinan hubungan kerjasama yang sinergis diperlukan antarinstansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sebuah kebijakan akan berjalan dengan baik apabila para implementor saling mendukung dan bersinergi bekerja sama dengan baik sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing masing.

Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter belum berjalan sesuai dengan harapan mengingat belum adanya sinergitas serta kesepahaman mengenai pembangunan pendidikan karakter di Kulon Progo antara pihak-pihak terkait. Maka dari itu perlu adanya kesepahaman antar organisasi terkait tentang pembangunan pendidikan karakter yang hendak dicapai di Kabupaten Kulon Progo.

f. Kurangnya pengetahuan stakeholders tentang Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter

Salah satu kendala terbesar terhadap belum optimalnya kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter yaitu banyak dari elemen masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya kebijakan ini. Kebijakan ini hanya diketahui oleh segelintir instansi saja dan belum menyeluruh. Hal ini berdampak pada partisipasi serta dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di Kabupaten Kulon Progo. Maka, perlunya usaha yang lebih keras yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kulon Progo untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta mengedukasi mengenai pentingnya pendidikan karakter bagi masyarakat.

g. Mutasi jabatan kepala sekolah

Program penguatan pendidikan karakter di Kulonprogo yang dijadwalkan dimulai pada awal tahun 2018 belum bisa dimulai sebagaimana mestinya dikarenakan adanya mutasi jabatan kepala sekolah di sebagian sekolah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Adanya mutasi jabatan tersebut menjadi alasan program yang diperuntukan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan

Pendidikan Dasar (Dikdas) di Kulonprogo belum terlaksana.

Saat ini beberapa sekolah belum semua menerima sosialisasi terkait program tersebut. Ada beberapa sekolah di Kulon Progo yang baru saja memiliki kepala sekolah yang baru, sehingga ada yang mengetahui tentang program penguatan pendidikan karakter dan ada yang belum mengetahui karena ada yang baru saja di mutasi serta ada juga yang baru mengalami serah terima jabatan.

2. Faktor penghambat eksternal

a. Minimnya partisipasi dari masyarakat

Sebuah kebijakan akan berjalan sesuai dengan baik serta efektif apabila mendapat banyak dukungan dari masyarakat. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat tentu ikut andil dalam mensukseskan sebuah kebijakan. Masyarakat Kabupaten Kulon Progo memiliki peranan penting dalam rangka penyelenggaraan pendidikan karakter.

Akan tetapi pada pelaksanaan kebijakan ini masyarakat Kulon Progo justru banyak yang belum mengetahui akan pentingnya pendidikan karakter. Ketidaktahuan masyarakat akan adanya kebijakan ini semakin mempersulit hasil dari kebijakan yang diharapkan. Pemerintah daerah harus lebih bekerja keras dalam memhamkan penntingnya pendidikan karakter kepada masyarakat agar dapat mewujudkan pembangunan sumberdaya manusia di wilayah Kulon Progo yang baik kuat sesuai dengan amanah tujuan pendidikan nasional.

b. Perlunya adaptasi dari sekolah dalam melaksanakan kebijakan penguatan pendidikan karakter

Salah satu sasaran kebijakan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter adalah satuan pendidikan atau lembaga sekolah. Pelaksana kebijakan ini adalah elemen sekolah yaitu meliputi kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan siswa. Elemen sekolah tersebut tentu harus mendapat bekal serta pengetahuan terlebih dahulu sebelum melaksanakan fungsi dan perannya masing-masing dalam mendukung penguatan pendidikan karakter di sekolah.

Pada pelaksanaannya tentu setiap sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan di Kabupaten Kulon Progo mempunyai tingkat pemahaman dan kemampuan dalam menerima sebuah inovasi baru dalam kegiatan pembelajaran. Pemerintah daerah Kulon Progo menyadari bahwa setiap sekolah perlu menyesuaikan

diri atau beradaptasi dengan adanya penerapan penguatan pendidikan karakter yang terinternalisasikan pada kegiatan pembelajaran. Kepala sekolah harus bisa mengkoordinasikan kepada seluruh elemen sekolah untuk bersama-sama mendukung kegiatan penguatan pendidikan karakter.

Apabila ditinjau dari variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter, hal ini sesuai dengan pandangan George Edwards dalam (Suharno, 2010: 188), yaitu komunikasi, sumberdaya, Disposisi dan struktur birokrasi.

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh agen pelaksana kebijakan harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Selain itu kelompok sasaran kebijakan juga harus di berikan informasi mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan, hal ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran.

Pada penelitian ini ada komunikasi yang kurang berjalan dengan baik bahwa implementor kurang memahami dan kurang menjalankan peran dan tanggung jawab sesuai dengan mekanisme yang ada. Selain itu sasaran kebijakan pada penelitian ini belum secara sepenuhnya memahami dan menerima adanya kebijakan, sehingga perlunya koordinasi dan sosialisasi secara intensif dan berkelanjutan.

2) Sumberdaya.

Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berbentuk sumberdaya manusia yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta tidak hanya menjadi angan-angan ataupun dokumen diatas kertas semata. Pada penelitian sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial memiliki pengaruh yang besar terhadap implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter.

3) Disposisi

Disposisi yang dimaksud adalah menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis dan sebagainya. Disposisi yang dimiliki oleh implementator menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter di Kabupaten Kulon Progo. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat

menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

4) Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo harus membuat SOP dalam rangka melaksanakan ataupun mengawasi kebijakan.

B. Optimalisasi implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter di Kabupaten Kulon Progo

Proses implementasi kebijakan pada umumnya memang lebih sulit dari sekedar merumuskannya. Pemerintah daerah dalam hal ini Didikpora Kabupaten Kulon Progo selaku organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perlu melakukan upaya dalam rangka mengatasi penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan PPK di Kulon Progo.

1. Upaya pemerintah daerah Kulon Progo, antara lain:

a. Menetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter

Peraturan Bupati ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter. Pada peraturan bupati ini terdapat beberapa perangkat kebijakan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara lain modul penguatan pendidikan karakter, kurikulum muatan lokal, silabus penguatan pendidikan karakter, serta SOP pagi dan siang hari pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di sekolah. Pada peraturan bupati ini juga dijabarkan secara mendetail mengenai tujuan dari setiap pengembangan nilai karakter yang hendak dicapai.

Pemerintah daerah Kulon Progo dalam melakukan penyusunan peraturan bupati ini membutuhkan proses diskusi yang lama dengan melibatkan banyak instansi dan elemen masyarakat lainnya. Mengingat banyaknya aspek yang harus di cantumkan dan dibuat secara mendetail agar sataun pendidikan dapat melaksanakan kebijakan

penguatan pendidikan karakter secara optimal dan efektif.

b. Meningkatkan jumlah sumberdaya tenaga pendidikan bidang agama sesuai dengan kebutuhan

Tenaga pendidik bidang agama dalam implementasi kebijakan ini memiliki peran penting dalam menamkan aspek nilai religiusitas pada setiap siswa sesuai dengan jenjang pendidikan. Pemerintah daerah Kulon Progo dalam mengatasi minimnya tenaga pendidik bidang agama saalh satunya yaitu dengan meningkatkan jumlah tenaga pendidik bidang agama melalui menarik guru -guru agama yang berda di swasta maupun madrasah untuk ditempatkan ke sekolah-sekolah negeri. Hal ini sesuai dengan amanah dari Kementrian PAN dan RB. Penarikan ini dilakukan secara bertahab mengacu pada prinsip penataan tenaga pendidik.

Selain itu, pemerintah daerah juga melaksanakan beberapa program peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik bidang agama dan biang lain dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Upaya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter bahwa strategi daerah dalam pelaksanaan Pendidikan Karakter diperlukan pemeberian dukungan sumber daya manusia, serta perlunya penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas pada setiap jenjang pendidikan.

c. Pengadaan dan atau rehabilitasi sarana prasarana pendidikan karakter secara memadai dan merata

Pemerintah daerah Kulon Progo dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, maka aspek sarana dan prasarana pendidikan harus diperhatikan dan diperbaiki. Mengacu pada ketentuan peraturan bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan, maka setiap satuan pendidikan harus mempunyai dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penguatan pendidikan karakter. Pemerintah daerah Kulon Progo melalui Disdikpora melakukan pendataan dan pemataan sekolah untuk mengetahui prioritas bantuan pengembangan sarana dan prasarana sekolah secara baik dan merata. Hal ini dilakukan mengingat tidak semua sekolah dilakukan pengadaan atau pembaharuan sarana dan prasarana yang bersifat baru dan meyeleuruh.

Berdasarkan program kerja Disdikpora Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan komitmen daerah untuk memperbaiki kualitas pendidikan yaitu dengan melakukan rehabilitasi maupun pengadaan

sarana dan prasarana pendidikan secara bertahab disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Upaya ini sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter bahwa pemerintah daerah wajib melakukan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebijakan, kemampuan dan kewenangan daerah.

d. Meningkatkan anggaran pembiayaan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan

Peningkatan anggaran pembiayaan penguatan pendidikan karakter sangat penting dilakukan agar masa depan kebijakan PPK dapat terus berjalan dengan baik. Pemerintah daerah Kulon Progo dalam mendukung kebijakan PPK, saat ini telah meningkatkan anggaran pengutan pendidikan karakter sebesar Rp. 60.000,- per tahun untuk setiap siswa. Sehingga total anggaran yang digunakan adalah Rp. 60.000 per tahun untuk setiap siswa TK, Rp.210.000,per tahun untuk setia siswa SD, dan Rp.260.000,- per tahun untuk setiap siswa SMP.

Peningkatan anggaran ini disetujui oleh DPRD Kabupaten Kulon Progo untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan pendidikan karakter yang lebih baik dan efektif. Selain itu, pemerintah daerah Kulon Progo mendapatkan dukungan dana istimewa dari pemerintah provinsi DIY atas kerja kerasnya dalam dunia pendidikan melalui pengembangan pendidikan budaya kemataraman, rencannya dana istimewa ini cair pada awal tahun 2019.

e. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi antarorganisasi terkait

Pemerintah daerah Kulon Progo dalam rangka meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan pendidikan karakter telah melaksanakan kerjasama dan melaksanakan koordinasi yang intensif dan berkelanjutan dengan instansi terkait seperti Kementrian Agama RI, Kementrian Penididikan dan Kebudayaan RI, Dinas Kebudayaan Kulon Progo serta intansi lain seperti polisi, danramil, camat, kepala desa, KUA dan elemen masyarakat lainnya. Koordinasi dan kerjasama ini terus dibangun dan di jaga agar pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di Kabupaten Kulon Progo dapat berjalan dengan baik dan kondusif.

f. Sosialisasi secara bertahab dan berkelanjutan

Sosialisasi kebijakan ini sangat penting dilakukan agar agen pelaksana maupun

sasaran kebijakan dapat memahami peran dan tanggung jawab dalam rangka melaksanakan penguatan pendidikan karakter di Kabupaten Kulon Progo. Adapun sosialisasi kebijakan ini dilaksanakan pada:

- 1) Hari Senin, Tanggal 11 November 2017 bertempat bertempat di UPTD PAUD dan DIKDAS Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo
- 2) Hari Selasa, Tanggal 12 November 2017 bertempat bertempat di UPTD PAUD dan DIKDAS Kecamatan Pengasih dan Sentolo Kabupaten Kulon Progo
- 3) Hari Rabu, Tanggal 13 November 2017 bertempat bertempat di UPTD PAUD dan DIKDAS Kecamatan Nanggulan dan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo
- 4) Hari Kamis, Tanggal 14 November 2017 bertempat bertempat di UPTD PAUD dan DIKDAS Kecamatan Galur dan Lendah Kabupaten Kulon Progo
- 5) Hari Jumat, Tanggal 15 November 2017 bertempat bertempat di UPTD PAUD dan DIKDAS Kecamatan Temon dan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo
- 6) Hari Senin, Tanggal 18 November 2017 bertempat bertempat di UPTD PAUD dan DIKDAS Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo
- 7) Hari Selasa, Tanggal 19 November 2017 bertempat bertempat di UPTD PAUD dan DIKDAS Kecamatan Panjatan dan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo

g. Merotasi dan atau mempromosikan jabatan kepala sekolah

Pemerintah daerah Kulon Progo telah melaksanakan kegiatan pelantikan sebanyak 173 kepala sekolah yang baru pada akhir tahun 2017 tepatnya pada tanggal 31 Desember 2017 bertempat di Aula Adikarto. Hal ini sangat penting mengingat harus adanya keselerasan kebijakan pemerintah melalui program PPK pada satuan pendidikan dengan peran kepala sekolah.

Merotasidan atau promosi jabatan kepala sekolah adalah hal yang biasa dan lumrah karena merupakan bagian dari pengembangan karier pegawai. Promosi diharapkan bermuara pada pelayanan masyarakat semakin berkualitas

h. Mensinergikan kebijakan pemerintah dengan peran masyarakat

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter dimana masyarakat memiliki andil penting terhadap penyelenggaraan pendidikan di daerah dalam rangka memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan

serta penumbuh kembangan karakter bangsa. Oleh karena itu, sinergitas antara pemerintah dan masyarakat sangat penting mengingat tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas bersama dan harus dilakukan dengan saling mendukung sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing agar tujuan dari pendidikan karakter dapat tercapai.

i. Menginternalisasikan pendidikan karakter pada kegiatan pembelajaran yang menyenangkan

Hasil dari kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter dapat dirasakan atau dipetik manfaatnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan secara hikmat, berulang-ulang dan dalam periode yang lama. Begitu juga dalam hal memahami pendidikan karakter pada siswa di sekolah dan lingkungan masyarakat perlu proses yang panjang dan tidak mudah, mengingat karakteristik siswa berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah merancang pendidikan karakter yang terintegrasi pada kegiatan pembelajaran yang menyenangkan di sekolah.

Apabila kegiatan pembelajaran berjalan dengan menyenangkan, maka siswa akan merasa nyaman dan aman dalam belajar. Kondisi ini yang kemudian menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. Kegiatan ini harus menjadi budaya di seluruh satuan pendidikan, agar semua sekolah dapat mengampayekan gerakan sekolah menyenangkan pada siswa.

2. Upaya satuan pendidikan

Hasil pendidikan karakter baru dapat diketahui dalam jangka waktu yang panjang, oleh karena itu pendidikan karakter harus dimulai dari sekarang. Pendidikan karakter dilaksanakan dalam rangka menumbuhkan peserta didik agar berakhlak mulia dan berprestasi secara akademis maupun nonakademis. Penumbuhan karakter berfungsi membentuk peserta didik yang dapat berperan dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, aman dan sejahtera.

Strategi penumbuhan karakter pada satuan pendidikan disesuaikan dengan masing-masing jenjang pendidikan yaitu TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs. Kegiatan ini dilakukan melalui keteladanan, intervensi, pembiasaan yang dilakukan secara konsisten yang terintegrasi pada kegiatan pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah.

Penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan

belajar mengajar yang dilaksanakan untuk penguatan pendidikan karakter sesuai kurikulum. Kegiatan intrakurikuler dalam mendukung penguatan pendidikan karakter pada jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs dilaksanakan melalui kegiatan penguatan pendidikan berbasis agama, penguatan pendidikan berbasis pengamalan nilai pancasila dan penguatan pendidikan berbasis budaya kemataraman.

Kegiatan kokurikuler pada jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan pendidikan karakter sesuai dengan kompetensi dasar atau indikator pada setiap mata pelajaran/bidang yang tertuang dalam kurikulum. Kegiatan kokurikuler ini dilaksanakan untuk memperkuat penguasaan materi pelajaran oleh peserta didik melalui penugasan terstruktur, penugasan mandiri dan kegiatan lainnya.

Kegiatan ekstrakurikuler ini hanya diperuntukan pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. kegiatan ini merupakan kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemampuan peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian penguatan pendidikan karakter meliputi kegiatan krida, latihan olah bakat/minat, kebudayaan dan agama.

Pengelolaan pendidikan karakter di Kulon Progo sesuai dengan pandangan Mulyasa (2013: 3) bahwa pendidikan karakter merupakan upaya untuk membantu perkembangan jiwa anak-anak baik lahir maupun batin, dari sifat kodrattinya menuju ke arah peradaban yang manusiawi dan lebih baik. Mulyasa menjelaskan bahwa pendidikan karakter memiliki makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan masalah benar-salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan (*habit*) tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan, sehingga anak/peserta didik memiliki kesadaran, dan pemahaman yang tinggi, serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehubungan dengan hal tersebut melalui pembiasaan serta kegiatan pembelajaran berbasis keagamaan, kegiatan berbasis nilai Pancasila, dan berbasis pada budaya kemataraman, melalui kegiatan tersebut peserta didik akan menanamkan kebiasaan tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan, sehingga lambat laun peserta didik akan memiliki kesadaran serta pemahaman yang tinggi dan komitmen tinggi untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Optimalisasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter di Kabupaten Kulon Progo” yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter, antara lain:
 - a. Faktor penghambat internal
 - 1) Pembuatan modul penguatan pendidikan karakter yang membutuhkan proses yang lama
 - 2) Sumberdaya tenaga pendidik bidang agama yang terbatas
 - 3) Sarana dan prasarana penguatan pendidikan karakter yang belum memadai serta merata
 - 4) Minimnya dukungan pembiayaan penguatan pendidikan karakter
 - 5) Belum terjalinnya koordinasi yang baik antarorganisasi terkait
 - 6) Kurangnya pengetahuan stakeholders tentang kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
 - 7) Mutasi jabatan kepala sekolah
 - b. Faktor penghambat eksternal
 - 1) Minimnya prtisiapasi dari masyarakat
 - 2) Perlunya adaptasi dari sekolah dalam melaksanakan penguatan pendidikan karakter
2. Optimalisasi implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter di Kabupaten Kulon Progo, antara lain:
 - a. Upaya Pemerintah daerah yaitu:
 - 1) Menetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan
 - 2) Meningkatkan jumlah tenaga pendidik bidang agama sesuai kebutuhan
 - 3) Pengadaan dan atau rehabilitasi sarana prasarana penguatan pendidikan karakter
 - 4) Meningkatkan anggaran pembiayaan penguatan pendidikan karakter
 - 5) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antarorganisasi terkait
 - 6) Sosialisasi secara bertahap dan berkelanjutan
 - 7) Merotasi dan atau promosi jabatan kepala sekolah

- 8) Meninternalisasikan kebijakan pada pembelajaran yang menyenangkan
 - 9) Menciptakan gerakan sekolah menyenangkan
- b. Optimalisasi implementasi kebijakan oleh satuan pendidikan

Strategi penumbuhan karakter pada satuan pendidikan disesuaikan dengan masing-masing jenjang pendidikan yaitu TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs. Penguatan pendidikan karakter dilakukan melalui keteladanan, intervensi, pembiasaan yang dilakukan secara konsisten yang terintegrasi pada kegiatan pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, terdapat beberapa saran yang diajukan peneliti sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo
 - a. Pengembangan pendidikan karakter di semua lini bidang/urusan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
 - b. Penyediaan kesempatan pendidikan yang berkualitas di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
 - c. Peningkatan tata kelola manajemen pendidikan secara efektif.
 - d. Mengadakan *event* dalam rangka mendorong minat dan bakat siswa.
2. Bagi Satuan Pendidikan
 - a. Memberi kepercayaan kepada sekolah dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif.
 - b. Memberdayakan orangtua untuk terlibat aktif pada pembelajaran serta tumbuh kembang anak.
3. Bagi Masyarakat
 - a. Menciptakan kondusifitas lingkungan belajar anak
 - b. Memberikan contoh keteladanan yang baik di lingkungan masyarakat pada anak

DAFTAR PUSTAKA

- Depdikbud. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- Ghony, M.D & AlManshur, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Lickona, T. (2013). *Pendidikan karakter panduan lengkap mendidik siswa menjadi pintar dan*

baik. (Alih Bahasa: Lita S). Bandung: Nusa Media.

- Moleong, L.J. (2017). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya.
- Mulyasa. (2013). *Manajemen pendidikan karakter*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muslich, M. (2014). *Pendidikan karakter; menjawab tantangan krisis multideminsional*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18, Tahun 2015, tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 18).
- Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 65, Tahun 2017, tentang Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 67).
- Subarsono, AG. (2016). *Analisis kebijakan publik konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Penelitian kualitatif kuantitatif dan r&d*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2016). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2010). *Dasar-dasar kebijakan publik: kajian proses dan analisis kebijakan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Wiratha. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: AndiOffset.
- Zubaedi. (2011). *Desain pendidikan karakter: konsep dan aplikasinya dalam lembaga pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.